

PENGUATAN NASIONALISME MELALUI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Abdul Khakim dan Miftakhul Munir
Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) PGRI Pasuruan, Indonesia

Abstract : Islam very supports nationalism of the nation. It can be inspiration and motivation for the development of the nation with the ideology of Pancasila, instead of playing a disintegrative counter-ideology. Conflict in the name of religion that is currently common in Indonesia not because of the teachings of Islam. That's more because the adherents who understand the religious texts are half-way or less comprehensive. In this case Islamic Education has a hard task to make people aware. He is expected to avoid the following: 1. Cultivate the spirit of blind fanaticism. 2. Growing an intolerant attitude among learners and Indonesian society and. 3. To weaken the harmony of religious life as well as national unity and unity. This study aims to find out about nationalism in Islamic Religion, as well as the role of Islamic education in strengthening the spirit of nationalism of the Indonesian Nation and the proper relationship between nationalism and religion.

Keyword : Nasionalism, Islamic Education

Pendahuluan

Agama Islam menurut Gus Dur sangat mendukung nasionalisme. Ia menyatakan bahwa ada hubungan antara Islam dan nasionalisme dalam kaitan hidup bernegara. Dimana agama (Islam) mampu memberi kontribusi positif dalam nasionalisme Indonesia.¹

Berbagai pihak yang terang-terangan ingin memisahkan diri dari kesatuan Indonesia atau mendirikan negara berbasis agama ditanggapi cucu Hasyim Asyari ini dengan penolakan. Ia mengatakan bahwa tidak ada konsep negara dalam Islam. Ia menilai gagasan mengenai negara Islam tidaklah konseptual, dan tidak diikuti oleh mayoritas muslim. Akan tetapi hanya dipandang sebagian kecil orang yang memandang Islam dari sudut institusionalnya saja.²

Merupakan sebuah kewajiban bagi seorang muslim untuk mempertahankan kedaulatan negara dan berusaha untuk membangunnya. Nabi Muhammad saw juga telah bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Imam Bukhori.

Dari Ibnu Abbas r.a dari Nabi saw beliau bersabda: "Siapa yang melihat suatu tindakan pembesarnya yang tidak menyenangkan, hendaklah bersabar karena siapa yang keluar dari kekuasaan yang sah barang sejenkal, niscaya orang itu mati secara kematian jahiliah."³

¹ Abdurrahman Wahid, *Gus Dur Menjawab Kegelisahan Rakyat*, (Jakarta: Kompas, 2007), hlm. 110.

² Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*, (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), hlm. 84.

³ Bukhori, *Terjemah Hadits Shahih Bukhori* jilid 4, (Jakarta: PT Bumi Restu, 1992), cet. ke-13,

Hal ini menunjukkan bahwasanya Islam sebagaimana yang diajarkan Rasulullah juga mensyariatkan umatnya untuk memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi dan tidak diperkenankan untuk mengambil tindakan memisahkan diri dari kepemimpinan negara yang syah.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa menipisnya ikatan kebangsaan karena agama memang terjadi, hal ini dindikasikan oleh munculnya gerakan-gerakan separatis di Indonesia. Akan tetapi hal itu bukan karena ajaran agama (khususnya Islam) yang tidak mendukung nasionalisme akan tetapi karena para pemeluk agama mengalami pendangkalan pemahaman teks-teks keagamaan. Disinilah arti penting pendidikan Islam. Yaitu sebagai media transfer pemahaman keIslaman yang inklusif dan kontekstual. Karena sampai sekarang pendidikan dipercaya sebagai sarana paling ampuh untuk proses transformasi nilai, termasuk nilai-nilai nasionalisme dalam Agama Islam.

Pendidikan merupakan kunci pokok dalam pembentukan jiwa nasionalisme rakyat Indonesia. Oleh karena itu diharapkan melalui pendidikan akan mampu melahirkan generasi yang memiliki kepribadian kuat dan jiwa nasionalisme yang tinggi, dengan begitu akan mampu menciptakan bangsa yang besar dan memiliki keadilan. Lebih spesifik lagi pendidikan Islam dalam konteks kebangsaan sangat diharapkan mampu memberikan pemahaman Islam yang inklusif, komprehensif dan kontekstual. Namun jika pendidikan Islam mengalami kegagalan maka yang terjadi justru sebaliknya. Bangsa Indonesia akan terpecah menjadi serpihan-serpihan kecil dengan batas perbedaan suku, ras, agama atau bahkan hirarki ekonomi. Sehingga tujuan dan cita-cita luhur bangsa yang terangkum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 hanya akan menjadi mimpi masa lalu yang tak pantas diceritakan.

Nasionalisme Indonesia

Nasionalisme berasal dari kata *nation* yang berarti bangsa. Adapun bangsa sebagaimana pendapat Badri Yatim memiliki dua pengertian, yaitu secara antropologis-sosiologis dan politis. Dalam pengertian pertama bangsa dimaknai sebagai suatu masyarakat yang merupakan suatu persekutuan-hidup yang berdiri sendiri dan masing-masing anggota persekutuan-hidup tersebut merasa satu kesatuan ras, bahasa, agama, sejarah dan adat istiadat. Sedangkan dalam pengertian kedua, bangsa dimaknai sebagai suatu daerah yang sama dan mereka tunduk kepada kedaulatan negaranya sebagai suatu kekuasaan tertinggi ke luar dan ke dalam.⁴

Selain itu, Badri Yatim juga mengutip pendapat beberapa tokoh mengenai nasionalisme.⁵

- a. Menurut Huszer dan Stevenson nasionalisme adalah yang menentukan bangsa mempunyai rasa cinta secara alami kepada tanah airnya.
- b. L. Stoddard nasionalisme adalah suatu keadaan jiwa dan suatu kepercayaan yang dianut oleh sejumlah besar manusia perseorangan sehingga mereka membentuk suatu kebangsaan. Atau dengan kata lain nasionalisme adalah rasa

hlm 125.

⁴ Badri Yatim, *Soekarno, Islam dan Nasionalisme*, (Jakarta: Logos, 1999), hlm 58.

⁵ *Ibid*, hlm. 58-60

kebersamaan segolongan sebagai suatu bangsa.

- c. Hans Kohn menyatakan bahwa negara kebangsaan adalah cita-cita dan satu-satunya bentuk sah dari organisasi politik, dan bahwa bangsa adalah sumber dari semua tenaga kebudayaan kreatif dan kesejahteraan ekonomi.
- d. Soekarno mendefinisikan nasionalisme sebagai kombinasi dari rasa ingin bersatu, persatuan perangai dan nasib, serta persatuan antara orang dan tempat.

Di lain pihak didefinisikan nasionalisme sebagai sebuah ideologi yang menyatakan suatu afinitas kelompok yang didasarkan atas bahasa, budaya, keturunan bersama; dan terkadang pada agama dan wilayah yang bersama pula; terhadap semua pengakuan lain atas loyalitas seseorang.

Nasionalisme atau kebangsaan dapat pula diartikan sebagai komunitas manusia yang memiliki nama/identitas bersama, memiliki keyakinan, komitmen dan sejarah bersama, memiliki budaya publik bersama, memiliki sistem perekonomian tunggal/bersama, memiliki hak dan kewajiban yang sama bagi anggotanya, dan menguasai tanah air bersama.⁶ Definisi lain menyatakan “*Nationalism recognized the crucial importance of education in the making of modern person – i.e. an individual skilled to function in industrial society.*”⁷

Sedangkan dalam buku lain dijelaskan bahwa nasionalisme adalah “paham ideologis yang mengajarkan kecintaan, kebanggaan dan kepercayaan besar terhadap negara dan bangsa sendiri demi mempertahankan dan mengekalkan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan dari bangsa dan negara yang bersangkutan.”⁸

Nasionalisme dalam Bahasa Arab diartikan sebagai *al suubiyah* atau menurut pendapat lain disebut juga *al wathoniah* menurut Frank Dhont yang dikutip Zudi setiawan didefinisikan sebagai paham dan proses di dalam sejarah ketika sekelompok orang merasa menjadi anggota dari suatu bangsa (*nation*) dan mereka secara bersama-sama ingin mendirikan sebuah negara (*state*) yang mencakup semua anggota kelompok tersebut.⁹

Antony Smith membagi pandangan nasionalisme dalam dua aliran besar, yaitu instrumentalis modernis dan perennialis primordialis.¹⁰ Aliran pertama, instrumentalis modernis menganggap *nation* dan nasionalisme sebagai instrumen yang dipergunakan elite politik untuk meraih tujuannya. *Nation* dan nasionalisme dianggap sebagai produk dari suatu syarat-syarat modernisasi seperti halnya negara modern, birokrasi, sekularisasi dan kapitalisme.

Sedangkan aliran kedua, perennialis primordialis menganggap bangsa sebagai suatu yang bersifat primordial atau sebuah kodrat yang telah digariskan. *Nation* dianggap sebagai kenyataan sejarah yang kadang tidak diingat. Adapun negara, birokrasi dan partai politik dipandang sebagai pembagian etnik dan

⁶ Tatang Muttaqin dan Aris Subiyono, “Studi Pengembangan dan Pematapan Wujud Ikatan Kebangsaan”, http://www.budpar.go.id/filedata/1004_168-Kajian20041.pdf. Diambil pada 15 April 2018.

⁷ John A. Hall (ed.), *The State of The Nation*, (New York: Cambridge University, 1998), hlm 28.

⁸ Save M. Dagon, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, (Jakarta: Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara, 1997), hlm. 704.

⁹ Zudi Setiawan, *Nasionalisme NU*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2007), hlm. 25.

¹⁰ Ali Maschan Moesa, *Nasionalisme Kyai*, (Yogyakarta: Lkis, 2007), hlm 239.

identitas kultural yang sebelumnya telah ada.

Dalam hal ini ada perbedaan definisi antara bangsa dan negara. Mereka merupakan dua kata yang memiliki konteks berbeda dan memiliki pemahaman yang tidak sama. Bangsa adalah masyarakat etnis dan budaya yang merupakan sumber jatidiri masyarakat, sedangkan negara merupakan sebuah institusi politik atau sumber kekuasaan.

Dengan begitu bisa disimpulkan bahwa nasionalisme adalah rasa cinta yang dimiliki oleh sekelompok besar orang yang berada pada suatu wilayah tertentu terhadap tanah airnya dan mereka memiliki cita-cita dan tujuan yang ingin diraih bersama sebagai suatu bangsa. Rasa kecintaan ini merupakan sebuah kesadaran yang ditandai dengan kesetiaan dan upaya memuliakan dan mengutamakan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi atau golongan.

Agama Islam Memandang Nasionalisme Indonesia

Islam sebagai agama terakhir yang menyempurnakan ajaran-ajaran terdahulu tentunya memiliki kelebihan, yaitu mampu menjawab semua permasalahan umat dalam berbagai segi dan rentang waktu. Begitu juga dalam menghadapi permasalahan kebangsaan. Agama Islam sangat mendukung berbagai upaya untuk kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia.

Islam pada awalnya memiliki citra dan cerita yang positif karena penyebarannya dengan jalan damai dan berperan dalam peningkatan peradaban manusia. "Bahkan secara politis Islam telah menjadi kekuatan dominan yang mampu menyangga dan mempersatukan penduduk nusantara yang bertebaran ini ke dalam sebuah identitas baru yang bernama Indonesia, sekalipun pada akhirnya secara legal formal ikatan keindonesiaan ini diatur dan diperkuat oleh administrasi dan ideologi negara."¹¹

Dalam lingkup sejarah Indonesia agama Islam telah menunjukkan arti pentingnya dalam pembentukan kebangsaan Indonesia. Sejarah telah mencatat bahwa pondok pesantren dengan para kyainya menjadi basis paling kuat untuk melawan penjajah. Sebagaimana telah ditunjukkan dalam sebuah resolusi jihad yang dikeluarkan NU pada tanggal 22 Oktober 1945. Pesan jihadnya mampu mengobarkan semangat nasionalisme melawan penjajah seperti yang dimiliki oleh penyiar radio, Bung Tomo.

Sebelum membahas terlalu jauh, disini akan dipetakan beberapa gagasan tokoh muslim dari berbagai aliran pemikiran tentang kaitan antara agama dan negara. Dalam konteks keindonesiaan terdapat banyak paradigma yang menjelaskan konsep hubungan antara agama dan Negara-Bangsa Indonesia. Hal ini setidaknya bisa dipetakan dalam tiga golongan dengan paradigma masing-masing, yaitu golongan dengan paradigma integral, paradigma sekular dan paradigma simbiotik.

1. Paradigma Integral. Paradigma ini memiliki konsep tentang bersatunya agama dan negara. Dengan arti lain negara merupakan lembaga politik sekaligus lembaga keagamaan. Paham ini dianut oleh madzab Syiah dan banyak tokoh fundametalis. Kartosoewirjo, Amin Rais dan Hidayat Nur Wachid merupakan

¹¹ Zainuddin Maliki, *Agama Rakyat Agama Penguasa*, (Yogyakarta: Galang Press, 2000), hlm.xxv

beberapa di antara tokoh Indonesia yang memiliki pemahaman sebagaimana paradigma ini.

Pemikiran politik para penganut aliran ini cenderung ke arah Islam formal yang menghendaki negara-agama (*teocratic state*). Negara Pancasila yang selama ini terbangun dinilai belum final dan harus disempurnakan dengan menggunakan Islam sebagai tandingan konsep *nation-state*.¹² Dengan begitu cita-cita yang diinginkan adalah negara Indonesia dengan asas atau berundang-undang dasar Islam.

2. Paradigma Sekular atau idealis radikal. Paradigma ini menganggap bahwa antara agama dan negara merupakan suatu yang terpisah. Oleh karena itu, para penganut paham ini menolak Agama Islam dijadikan sebagai dasar negara. Paham ini diikuti oleh Soekarno.

Agama yang idealnya sangat membela hak-hak dan kebesaran Tuhan dan menekankan kewajiban manusia namun dianggap sangat sedikit menghargai keunggulan potensi manusia, menjadi alasan para penganut aliran ini. Menurut Komarudin Hidayat hal ini disebabkan trauma akan agama yang dinilai cenderung eksklusif, tidak ilmiah, dan mendorong orang menjadi fanatik terhadap kelompoknya, tidak toleran terhadap kelompok yang berbeda dan bahkan cenderung otoriter.¹³ Oleh karena itu, agama dimasukkan dalam ruang privasi dan tidak dikehendaki ikut campur dalam konteks yang lebih luas seperti dalam lingkup politik kenegaraan.

3. Paradigma Simbiotik atau akomodatif. Paradigma terakhir ini memiliki konsep bahwa antara agama dan negara memiliki hubungan timbal balik yang saling membutuhkan dan saling mendukung. Cak Nur dan Gus Dur adalah di antara tokoh muslim Indonesia yang menganut pendapat ini.

Pemikiran politik aliran ini umumnya cenderung ke arah Islam substansial. Mereka menganggap dengan ideologisasi Islam berarti telah mereduksi Islam. Islam ditempatkan sebagai komplementer konsep *nation-state* dan Negara Pancasila dianggap telah final.¹⁴

Relasi ketiga ini sebenarnya juga memiliki masalah. Yaitu ketika Agama Islam yang lebih mengedepankan universalitas sedangkan negara selalu berbicara mengenai batasan dan lokalitas tertentu. “Dalam merespon persoalan ini, para kiai berpendapat bahwa Islam seharusnya cukup diposisikan sebagai dasar moralitas dalam mengatur negara.”¹⁵

Dari tiga tipe tersebut, Indonesia selama ini lebih menginginkan model terakhir, yaitu agama diharapkan mampu mensupport kehidupan kebangsaan. Hal ini melihat konteks Indonesia yang besar dan terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya. Keanekaragaman itu jika tidak diakomodir secara baik akan berpotensi menimbulkan masalah yang justru menghancurkan bangsa sendiri.

¹² Ali Maschan Moesa, *Op.Cit...*, hlm 285.

¹³ Zainuddin Maliki, *Op.Cit.*, hlm. xxii.

¹⁴ Ali Maschan Moesa, *Op.Cit.*, hlm. 290.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 232.

Arti Penting Pendidikan Agama Islam dalam Penguatan Nasionalisme

Islam merupakan penuntun dan sumber nilai bagi para muslim. Adapun proses transformasi ajaran Islam itu bisa dilakukan melalui berbagai jenis pendidikan. Dengan begitu Pendidikan agama Islam memiliki tugas yang berat. Akan tetapi selama ini pendidikan di Indonesia dinilai gagal dalam mengemban tugasnya. Begitu juga yang terjadi pada pendidikan agama yang seharusnya mengambil peran sentral dalam membangun karakter masyarakat dalam kehidupan nyata.

Menurut Muhaimin kegagalan tersebut setidaknya disebabkan oleh dua aspek. Pertama pendidikan agama telah kehilangan ruh moralnya karena masih berpusat dengan persoalan yang bersifat simbolik, ritualistik dan legal formal. Kedua, kegiatan pendidikan agama yang tidak mampu menyentuh ranah psikomotorik sehingga apa yang telah diajarkan kepada peserta didik tidak mampu diwujudkan dalam tingkah nyata dalam kehidupan.¹⁶

Di lain pihak Qodri Azizy menilai nilai-nilai ideal agama Islam yang tidak terwujud di kehidupan sehari-hari dalam sistem sosial adalah bukti adanya krisis multi dimensi atau krisis lingkaran setan, dan untuk memperbaikinya harus dengan kembali kepada ajaran agama.¹⁷ Perbaikan ini harus dimulai dari para pemimpin bangsa dan elit politik dalam beretika sosial, sedangkan untuk jangka ke depan bangsa ini harus diperbaiki melalui pendidikan, termasuk pendidikan agama.

Pelajaran agama dan praktek etika sosial harus mendapat perhatian serius di setiap sekolah/madrasah, sejak dari kebijakan dan kurikulum, sampai dengan praktek dan evaluasinya agar pendidikan agama mencapai tujuan sejatinya, yaitu terbangunnya kehidupan masyarakat yang bermoral secara ideal dan prakteknya atau dengan kata lain terwujudnya realitas masyarakat dengan perilaku moralitas.¹⁸

Sedangkan Dedi Supriadi menyatakan, penjabaran tujuan pendidikan yang salah satunya adalah dalam pencapaian iman dan taqwa (imtaq) mengalami kesulitan. Ia menilai dalam praktiknya pendidikan lebih mengutamakan dimensi tujuan yang bersifat instrumental yang berkenaan dengan aspek pengetahuan dan keterampilan. Hal ini karena sistem persekolahan lebih banyak mengejar pembelajaran akademik bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu. Alasan lain adalah karenapengembangan kedua pelajaran tersebut lebih mudah diamati dan diukur perkembangannya.¹⁹

Dengan begitu bisa disimpulkan bahwa pendidikan Agama Islam mengalami berbagai kendala dalam mencapai tujuan. Salah satu bukti kegagalannya adalah ketidakmampuannya dalam menanamkan ajaran-ajaran agama kepada masyarakat untuk bisa dipraktikkan dalam kehidupan nyata.

¹⁶ Muhaimin, *Arah Baru Pengembangan Pendidikan Islam*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2003), hlm.71.

¹⁷ Qodri Azizy, *Pendidikan Agama Untuk Membangun Etika Sosial*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2002), hlm. 82-85.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 85.

¹⁹ Dedi Supriadi, *Membangun Bangsa Melalui Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), hlm. 122.

Sebagai contoh meski Agama Islam sangat mencintai perdamaian akan tetapi banyak penganutnya yang justru melakukan tindakan teror, agama menghendaki keadilan sosial akan tetapi masyarakat enggan membayar zakat dan pajak, atau banyaknya kasus korupsi dan politik yang kotor di Indonesia.

Tantangan pendidikan agama Islam saat ini adalah bagaimana pendidikan tersebut tidak hanya mengajarkan pengetahuan tentang agama, akan tetapi dapat mengarahkan peserta didik memiliki kualitas keberagamaan yang kuat sehingga pendidikan agama mampu membentuk sikap dan kepribadian masyarakat yang memiliki iman dan taqwa yang sesungguhnya, dan juga dipraktekkan dalam dunia realitas secara kontekstual.

Adapun kendala yang dihadapi oleh pendidikan Agama Islam adalah pengajarannya yang tidak menyentuh aspek efektif dan psikomotor. Hal ini karena pengajarannya yang tidak lebih dari sekedar formalitas, ritualitas dan sekedar pengetahuan. Padahal pada intinya pendidikan agama lebih jauh dari itu, yaitu berkenaan dengan pembangunan moral dan menyentuh ranah afektif dan psikomotorik.

Seharusnya para guru mengacu pada peraturan yang telah dibuat pemerintah mengenai penilaian hasil belajar agama yaitu melalui pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan afeksi dan kepribadian peserta didik; serta ujian, ulangan, dan/atau penugasan untuk mengukur aspek kognitif peserta didik.²⁰

Pendidikan Islam tidak hanya diajarkan dalam ajaran-ajaran formal di sekolah, akan tetapi lebih banyak komunikasi dari luar sekolah. Harus diakui pendidikan memiliki begitu banyak model pengajaran, baik yang berupa pendidikan sekolah atau non formal seperti perkumpulan arisan dan pengajian. Kenyataan ini harus diakui dan mendapat perhatian, karena jika tidak maka pendidikan Islam dirasa pincang. Karena itu, ketika berbicara mengenai perbaikan pendidikan Agama Islam, maka yang dipikirkan adalah keseluruhan aspek yang juga tercakup di dalamnya pendidikan formal, non formal dan informal.

Menghadapi dunia yang semakin modern, pendidikan Islam harus mampu menyesuaikan diri. Dua hal yang saling terkait dalam pendidikan Islam saat ini adalah pembaharuan (*tajdid*) dan modernisasi (*al-hadasah*).²¹ Dalam pembaharuan pendidikan Islam ajaran-ajaran formal harus lebih diutamakan, dan kaum muslimin harus dididik dengan ajaran-ajaran agama mereka. Adapun yang diubah adalah cara-cara penyampaiannya sehingga ia akan mampu memahami dan mempertahankan kebenaran. Adapun modernisasi pendidikan Islam menuntut umat Islam untuk menjawab tantangan modernisasi. Tantangan seperti pengentasan kemiskinan, lingkungan hidup dan kebangsaan.

Adapun pembaharuan ini meliputi pengajaran teks-teks keagamaan yang perlu ditafsir ulang. Sedangkan teks-teks yang telah ditafsir ulang tersebut digunakan sebagai konsep untuk menjadi solusi konkrit dalam menghadapi masalah-masalah yang sedang dihadapi masyarakat. Tanpa kehadirannya Islam

²⁰ PP Nomor 19 tahun 2005.

²¹ Abdurrahman Wahid, *Islamku Islam Anda Islam Kita*, (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), hlm. 225.

akan mengalami "kemacetan" yang justru menyalahi ketentuan agama sebagai agama yang akan selalu sesuai kapanpun dan dimanapun.²²

Islam memiliki kepedulian yang tinggi terhadap keadaan dan masalah yang dihadapi sebuah bangsa atau negara. Dalam negara Indonesia yang plural ini, KH Ahmad Siddiq mengajukan konsep persaudaraan yang terdiri dari empat hal. *Pertama*, persaudaraan sesama manusia (*ukhuwah Basyariyah*), yaitu cara bergaul sesama umat manusia tanpa ada faktor pembeda, *kedua*, persaudaraan sesama umat beragama (*ukhuwah diniyah*), sebagai landasan sikap saling menghormati sesama umat beragama, *ketiga*, persaudaraan sesama umat Islam (*ukhuwah islamiyah*), prinsip persaudaraan internal tanpa melihat organisasinya dan *keempat*, persaudaraan sesama warga negara (*ukhuwah wathoniyah*), prinsip persaudaraan dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan dan mempertahankan kedaulatan negara dari ancaman apapun.²³

Empat prinsip inilah yang seharusnya ditanamkan dalam pribadi masyarakat Indonesia. Umat Islam tidak boleh melupakan sebuah kenyataan penting berupa rumusan ajaran Islam yang sebenarnya, sebagaimana yang ada pada ayat Al Quran bahwa Allah telah menciptakan manusia dengan segala perbedaannya untuk saling mengenal dan sikap dasar dari ketentuan Tuhan tetap berpegang kepada tali Allah secara keseluruhan, dan jangan terpecah-belah.

Sikap dasar ini juga merupakan antisipasi terhadap kenyataan akan masa depan agama Islam dan kaum muslimin, seperti telah terbukti dewasa ini yaitu Islam merupakan agama besar, tanpa mengecilkan agama-agama lain. Inilah yang belum disadari oleh sebagian muslim sehingga mereka memilih jalur yang kaku dan berhaluan keras. Sikap-sikap keras yang kita lihat masih ada di kalangan kaum muslimin mudah-mudahan akan hilang melalui pendidikan yang lebih baik dan komunikasi yang lebih *intens*.

Proses sosialisasi hasil internalisasi yang telah didinamisir, dapat dikembangkan pula dengan mendayagunakan forum-forum keagamaan (seperti pengajian, musyawarah hukum agama, pendidikan agama dan sebagainya) begi keperluan membicarakan hal-hal yang perlu diinternalisasikan secara dinamis, seperti dalam hal penggunaan semua forum di atas untuk meningkatkan kesadaran akan perlunya orientasi baru bagi pembangunan, dan seterusnya.²⁴

Penutup

Semua hal ini hanya bisa tercapai lewat pendidikan. Pendidikan yang tidak bertujuan membuat seseorang menjadi pintar saja atau sekarang menjadi kaya raya, tapi pendidikan seutuhnya yang mampu menjadi seorang manusia menjadi manusia seutuhnya, terbebaskan dari sifat-sifat hewani dalam dirinya.

Adapun yang bisa dilakukan adalah sebagai berikut: a) Mengembangkan materi agama yang komprehensif sehingga materi ini dapat menampilkan wajah agama sebagai karunia bagi pemeluk agama tersebut maupun pemeluk agama lain (*rahmatan lil alamin*) di dalam semua bidang kehidupan. b) Mengembangkan

²² *Ibid*, hlm 170

²³ Ali Maschan Moesa, *Nasionalisme Kyai*, (Yogyakarta: Lkis, 2007), hlm. 176.

²⁴ Abdurrahman Wahid, *Islam Kosmopolitan*, (Jakarta: The Wahid Institute, 2007), hlm. 43.

metode pengajaran agama yang kritis, dialogis, dan aplikatif dengan tetap berpegang pada standar kaidah-kaidah agama. c) Menciptakan kehidupan keagamaan (intra dan antarumat beragama) yang interaktif, dialogis dan toleran sehingga menumbuhkan semangat kebersamaan dan kerjasama.

Daftar Rujukan

- Azizy, Qodri. 2002. *Pendidikan Agama Untuk Membangun Etika Sosial*, Semarang: Aneka Ilmu.
- Bukhori. 1992. *Terjemah Hadits Shahih Bukhori* jilid 4, Jakarta: PT Bumi Restu
- Dagun, Save M. 1997. *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, Jakarta: Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara.
- Hall, John A (ed). 1998. *The State of The Nation*, New York: Cambridge University
- Maliki, Zainuddin. 2000. *Agama Rakyat Agama Penguasa*, Yogyakarta: Galang Press
- Moesa, Ali Maschan. 2007. *Nasionalisme Kyai*, Yogyakarta: Lkis.
- Muhaimin. 2003. *Arah Baru Pengembangan Pendidikan Islam*, Bandung: Nuansa Cendekia
- Setiawan, Zudi. 2007. *Nasionalisme NU*, Semarang: Aneka Ilmu.
- Supriadi, Dedi. 2004. *Membangun Bangsa Melalui Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Wahid, Abdurrahman. 2006. *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*, Jakarta: The Wahid Institute
- Wahid, Abdurrahman. 2007. *Gus Dur Menjawab Kekelisahan Rakyat*, Jakarta: Kompas
- Wahid, Abdurrahman. 2007. *Islam Kosmopolitan*, Jakarta: The Wahid Institute
- Yatim, Badri. 1999. *Soekarno, Islam dan Nasionalisme*, Jakarta: Logos